

PERAN PEMERINTAH DALAM MENCIPTAKAN PERUMAHAN LAYAK HUNI (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata ruang, Kabupaten Sidoarjo)

Rizki Priyo Atmoko, Mardiyono, Sukanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: rizkipriyoatmoko@gmail.com

Abstract: *Government's role to created livable housing. This research is motivated by the increasing amount of residential development as the the impact of the increasing population in Sidoarjo Regency. In a residential area there must be facilities that support daily activities it aims to ensure the feasibility of inhabited housing so that provide a sense of comfort, security, peace and prosperity for its residents. The research method that used is descriptive qualitative research approach that uses analytical methods Milles Huberman. The background of this research was appointed to see how the government's role in creating livable housing for the general welfare of society purpose. The results of this research are good enough, it is manifested, among others, in setting standards of housing construction, supervision and control of housing construction and improvement of the quality of housing. The role has been in accordance with the government's role as a stabilizer, an innovator and catalyst. Contributing factor in creating livable housing, among others, the assistance of the government in the form of physical development, the awards and the support of competent human resources. Inhibiting factor is the lack of human resources.*

Keywords: *livable housing, the role of government*

Abstrak: **Peran Pemerintah dalam Menciptakan Perumahan Layak Huni.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Dalam lingkungan perumahan sendiri harus terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang berkegiatan sehari-hari hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera bagi penghuninya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode analisis Milles Huberman. Latar belakang penelitian ini diangkat untuk melihat bagaimana peran pemerintah yang ada dalam menciptakan perumahan yang layak huni yang tujuan umumnya untuk menyejahterakan masyarakat. Hasil dari penelitian, peran pemerintah dalam menciptakan perumahan yang layak huni sudah cukup baik, hal ini diwujudkan antara lain dalam penetapan standarisasi pembangunan perumahan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan perumahan dan perbaikan kualitas perumahan. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya bantuan dari pemerintah berupa pembangunan secara fisik maupun pemberian penghargaan serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Faktor penghambat, kurangnya sumber daya manusia.

Kata kunci: peran pemerintah, perumahan layak huni

Pendahuluan

Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan multidimensi-onal tersebut menghendaki adanya, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam berbagai dimensi. Dalam konsep tersebut, menurut Moeljarto dalam Mashoed (2004, hal.2), kualitas manusia haruslah

dijadikan sebagai acuan normatif. Manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan. Pembangunan sendiri merupakan salah satu permasalahan terkait kepentingan publik yang memiliki *urgensi* tinggi untuk segera di atasi. Hal ini dilandasi atas keinginan manusia untuk selalu berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Ponsioen dalam Agus

Suryono (2010, hal.2) berpendapat, bahwa pembangunan nasional adalah bagian integral dari pembangunan suatu negara.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, maka akan amat luas cakupan dimensinya meliputi bidang wilayah, sumber daya alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Oleh karenanya, dalam proses pembangunan nasional akan terjadi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Kegiatan pembangunan sendiri telah memberikan dampak yang positif bagi manusia. Sedangkan, kehidupan manusia semakin dipermudah oleh beberapa produk-produk pembangunan. Namun di sisi lain, pembangunan sering kali kurang memperhitungkan dampaknya terhadap keharmonisan ekologi, baik keharmonisan pada lingkungan alam maupun manusia.

Salah satu pembangunan yang harus memperhitungkan dampak baik dari lingkungan dan manusia adalah perumahan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, Indonesia ke depan membutuhkan sekitar 13 juta unit rumah baru bagi masyarakat dan angka ini akan terus meningkat tiap tahunnya. Diketahui Penyelenggaraan perumahan dan pemukiman di Indonesia, sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat serta tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata. Tetapi lebih kompleks lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi, maupun politik. Di sinilah diperlukan kebijakan pemerintah di dalam mengelola persoalan perumahan dan pemukiman. Fakta tersebut, dapat dilihat dari masalah lingkungan pada kawasan pemukiman dan perumahan, yang umumnya muncul sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali.

Lingkungan perumahan yang sehat sendiri harus diikuti dengan pembangunan lingkungan perumahan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar yang memadai

seperti air minum, sanitasi lingkungan, jalan, listrik, fasilitas umum dan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan ekologi, baik ekologi lingkungan maupun manusia. Hal ini telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, perumahan sendiri mempunyai arti sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Melihat fenomena mengenai perumahan, diperlukan peran pemerintah dalam mengatur dan menangani pembangunan perumahan. Peran pemerintah dibutuhkan sejak awal, di mana dimulai sejak proses perizinan. Karena dari proses inilah dapat menggambarkan hasil akhir pembangunan perumahan itu sendiri. Di Sidoarjo terdapat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas PU CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Di dalam Dinas PU CKTR ini terdapat bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan perumahan yang membidangi perumahan dan pemukiman.

Dinas PU CKTR Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap hasil akhir sebuah pembangunan perumahan. Selain itu, Dinas PU CKTR menerima laporan dan keluhan mengenai perumahan, sehingga jika terdapat masalah dapat segera diatasi.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Pembangunan

Lubis (1985, hal.17) berpendapat bahwa Administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari tiga sudut: dari sudut proses, dari sudut fungsi, dan sudut kepranataan. Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai proses pemikiran, rencana, pengaturan, penggerakan, pengawasan sampai dengan proses tercapainya tujuan kita. Sedangkan pembangunan menurut Indrawijaya dan Pranoto (2011, hal.34) mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja

melainkan sektor lainnya. Sedangkan administrasi pembangunan sendiri menurut Weidner dalam Indrawijaya dan Pranoto (2011, hal.25) adalah administrasi negara dan publik yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan menyukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transfer teknologi, transformasi sosial, pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan.

Manajemen Publik

Menurut Frederick W. Taylor dalam Syafiie (2006, hal.48) ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah atau tidak. Pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Menurut Overman dalam Pasolong (2011, hal.83) manajemen publik adalah suatu studi indiscipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Manajemen baru merupakan suatu masalah besar setelah faktor dan sumber daya yang paling sukar untuk dikendalikan dan didayagunakan masuk ke dalam kancan karya, yaitu manusia. Maka manajemen menetapkan pada pengendalian dan pendayagunaan manusia itu sendiri. Manajemen sendiri juga dapat dijawab dengan menganalisis fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen itu antara lain sebagai berikut:

- a. *Planning*, perencanaan dapat diuraikan sebagai penentuan tindakan untuk waktu yang akan datang, dan jika perencanaan itu kita perlukan lebih metodis, maka kita akan dapat menguraikannya dengan pengoordinasian kegiatan-kegiatan yang akan datang pada waktunya.
- b. *Organizing*, pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan,

siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

- c. *Actuating*, pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
- d. *Controlling*, pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah tentunya juga terdapat faktor-faktor yang membuat otonomi daerah tersebut berjalan baik, menurut Josef R. K (2001, hal.59) ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah:

- 1) manusia pelaksananya harus baik;
- 2) keuangan harus cukup dan baik;
- 3) peralatan harus cukup baik; dan
- 4) organisasi dan manajemen harus baik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat faktor tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Menurut Sukanto (2009, hal.212) peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan

ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Siagian (2009, hal.142) menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama, yaitu:

- a. Selaku *Stabilisator*, pemerintah adalah *stabilisator* yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan lancar.
- b. Selaku *Modernisator*, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara kehidupan modern.
- c. Selaku *Pelopor*, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.
- d. Selaku *Inovator*, inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir yang baru. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”.
- e. Selaku *Katalisator*, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalkan, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya

mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

Perumahan

Pengertian perumahan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, penyelenggaraan perumahan dan pemukiman diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) kesejahteraan;
- 2) keadilan dan pemerataan;
- 3) keterjangkauan dan kemudahan; serta
- 4) keserasian dan keseimbangan;

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2006, hal.11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Dengan demikian penggunaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang didapat di lapangan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan langkah-langkah representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) peran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan perumahan layak huni, yang meliputi:
 - a) standarisasi pembangunan perumahan;
 - b) pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan; dan
 - c) pelaksanaan perbaikan kualitas perumahan.

2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan perumahan layak huni.

Pembahasan

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam Menciptakan Perumahan Layak Huni

a. Standarisasi pembangunan Perumahan

Seperti yang kita ketahui bahwa papan (perumahan) merupakan salah satu dari 3 (tiga) kebutuhan dasar manusia, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Dari pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada beberapa tahun terakhir ini terdapat peningkatan pembangunan perumahan di Kabupaten Sidoarjo, ini terjadi karena pertumbuhan penduduk di Sidoarjo meningkat dan penduduk memerlukan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan ide pokok dalam pembangunan yang disampaikan oleh Siagian dalam Suryono (2004, hal.21) salah satu ide pokok tersebut berbunyi bahwa pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. Dengan demikian, diperlukan peran pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan pengawasan, standarisasi, dan penetapan regulasi dalam pembangunan perumahan. Dalam melakukan pembangunan perumahan terdapat standarisasi yang harus dipenuhi, antara lain: jalan lingkungan, pembuangan limbah, utilitas, RTH, dan fasilitas umum dan sosial. Hal ini sesuai dengan pengertian perumahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas

umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman juga diatur asas-asas penyelenggaraan perumahan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, keterjangkauan dan kemudahan, serta keserasian dan keseimbangan.

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa untuk menjamin hasil akhir dari pembangunan khususnya perumahan diperlukan peran pemerintah selaku katalisator yang harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan serta mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

b. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan

Untuk menjamin hasil akhir dari pembangunan perumahan sesuai atau tidak dengan rencana awal yang diajukan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkoordinasi dengan instansi-instansi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain: BAPEDA, BPPT, BLH, PU Binamarga, PU Pengairan, dan Satpol PP. Pembentukan tim ini dinamakan BP4D (Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah), tim ini melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Menurut G.R Terry dalam Syafiie (2006, hal.50) Pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan dan Pengendalian. Tidak saja berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu pembangunan perumahan itu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan, sesuai dengan apa yang

terjadi di lapangan. Menurut Saleh, (1988, hal.2) dengan diadakannya pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, serta dapat lebih memahami apa yang terjadi di masa yang akan datang.

Koordinasi dalam pengawasan pembangunan perumahan ini juga perlu dilakukan karena koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih. Timbulnya koordinasi sendiri disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh Kaloh (2007, hal.275) bahwa kompleksnya fungsi dan kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh berbagai unit dan perorangan, bertambahnya spesialisasi memperbesar struktur organisasi itu sendiri. Jadi, jika dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

c. Pelaksanaan perbaikan kualitas perumahan

Pada pengertian perumahan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri yang mempunyai visi Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan selalu berupaya untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam upayanya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan kegiatan yang salah satunya adalah melaksanakan perbaikan kualitas perumahan, hal ini sesuai dengan salah satu peran pemerintah yang disebutkan oleh Siagian (2009, hal.142) bahwa selaku pelopor pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana

pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melakukan kegiatan perbaikan kualitas perumahan berdasar atas laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai lingkungan perumahan yang mereka hadapi, setelah itu ditindaklanjuti dengan survei di lapangan oleh tim dan baru diadakan lelang tender untuk pengerjaan perbaikan kualitas perumahan, tender ini diikuti oleh perusahaan swasta. Prosedur dan mekanisme dalam perbaikan kualitas memang sangat panjang dan lama, karena kegiatan ini juga membutuhkan partisipasi semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun swasta.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan perumahan layak huni.

a. Faktor pendukung

Pertumbuhan penduduk yang meningkat di Kabupaten Sidoarjo tentunya memiliki dampak yang dirasakan oleh warga masyarakat. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah kebutuhan akan rumah tinggal. Dengan banyaknya peminat perumahan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, maka banyak pengembang perumahan yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Sidoarjo mulai dari pengembang yang membangun perumahan sederhana, menengah ataupun mewah. Dengan banyaknya pengembang perumahan yang melakukan pembangunan perumahan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi dengan memberi penghargaan Griya Delta Nugraha. Penghargaan Griya Delta Nugraha diberikan kepada perumahan terbaik yang ada di Sidoarjo, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi pengembang

untuk membangun perumahan yang layak huni dan berkualitas.

b. Faktor penghambat

Dalam otonomi daerah sendiri salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah manusia atau sumber daya manusianya, seperti yang diungkapkan oleh Josef R.K (2001, hal.59) bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah manusia pelaksanaannya harus baik, artinya faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia subjek segala aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.

Kesimpulan

Peran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menciptakan perumahan layak huni.

1. Standarisasi pembangunan perumahan merupakan salah satu peran guna menjamin hasil akhir pembangunan perumahan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang dan harapan masyarakat pada umumnya.
2. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan merupakan juga merupakan salah satu peran pemerintah, dalam melakukan pengawasan ini sendiri berkoordinasi dengan beberapa

dinas. Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

3. Dalam mewujudkan perumahan layak huni, pemerintah juga melaksanakan perbaikan kualitas perumahan, perbaikan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat ataupun dari hasil pengawasan. Hal ini salah satu upaya untuk mewujudkan visi Sidoarjo yaitu Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan.

Faktor pendukung dan penghambat dalam menciptakan perumahan layak huni.

1. Faktor Pendukung

Dalam mewujudkan perumahan layak huni yang ada di Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah pemberian penghargaan Griya Delta Nugraha. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi pengembang untuk membangun perumahan yang layak huni dan berkualitas.

2. Faktor Penghambat

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik diperlukan SDM yang kompeten. Maka dari itu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah hal ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Indrawijaya, A. Ibrahim dan Juni Pranoto. (2011) **Revitalisasi Administrasi Pembangunan**. Bandung, Penerbit Alfabeta
- Josef. Riwu Kaho. (2001) **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Kaloh. (2007) **Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global**. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Lubis, Ibrahim. (1985) **Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen**. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mashoed (2004) **Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Membuka Kawasan Terisolasi**. Surabaya, Penerbit Papyrus.
- Pasolong, Harbani. (2011) **Teori Administrasi Publik**. Bandung, Alfabeta.
- Saleh, Ismail. (1988) **Serial: Apa yang Saya Alami Ketertiban dan Pengawasan**. Jakarta, Haji Masagung.
- Syafiie, K. Inu. (2006) **Ilmu Administrasi Publik**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2009) **Sosiologi suatu Pengantar**. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono (2006) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Alfabeta.

Siagian, P, Sondang. (2009) **Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya**. Jakarta, Bumi Aksara

Suryono, Agus. (2004) **Pengantar Teori Pembangunan**. Malang, Universitas Negeri Malang.

Suryono, Agus. (2010) **Dimensi-Dimensi Prima Teori Administrasi Pembangunan**. Malang, UB press

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.